

# ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN DAN KEUANGAN DAERAH

Kabupaten Konawe Utara

Wahyudi Kumorotomo  
Magister Administrasi Publik  
Universitas Gadjah Mada

[www.kumoro.staff.ugm.ac.id](http://www.kumoro.staff.ugm.ac.id)

[kumoro@map.ugm.ac.id](mailto:kumoro@map.ugm.ac.id)

081 328 488 444

# TEORI MENGENAI PENGANGGARAN (BUDGETING)

Wildavsky (*The Politics of the Budgetary Process*, 1979):

- “the budget lies at the heart of the political process”.
- “Anggaran adalah serangkaian tujuan dengan daftar harga terlampir”.

Rubin (*The Politics of Public Budgeting*, 2000):

- Budgets reflect choices
- Budgets reflect priorities
- Budgets reflect relative proportions of decisions made for local and constituency purposes.

→ Apakah Anggaran Publik di Indonesia sudah sesuai dengan kepentingan publik dan dipertanggungjawabkan kepada publik?

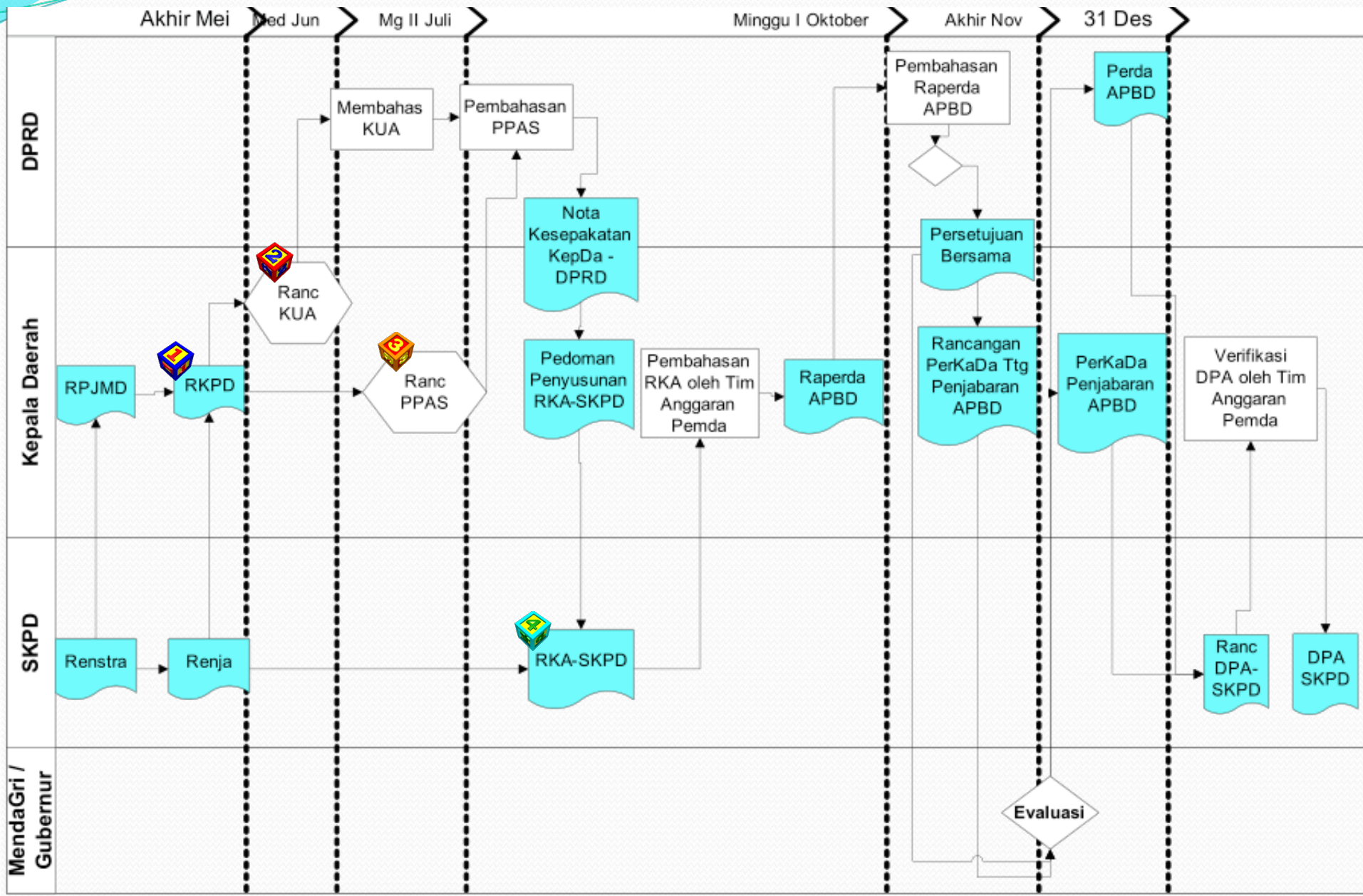
# Tujuan Pembangunan Daerah

1. Mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar-daerah, antar-strata masyarakat
2. Memberdayakan masyarakat & memberantas kemiskinan
3. Menciptakan lapangan kerja
4. Meningkatkan pendapatan & kesejahteraan rakyat
5. Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.

# Analisis Makro Keuangan Daerah

1. Melihat struktur APBD, membandingkan konsistensi antara prioritas di dalam dokumen rencana (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Senja SKPD) dengan proporsi anggaran.
2. Melihat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
3. Melihat komposisi belanja: perbandingan antara Belanja Tak Langsung dengan Belanja Langsung; Apakah belanja APBD sudah sesuai dengan misi peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik?
4. Melihat komposisi Belanja Langsung bagi SKPD. Apakah proporsinya sudah sesuai dengan sektor andalan di daerah tersebut? Apakah proporsinya sudah sesuai dengan prioritas pembangunan yang diperlukan?
5. Melihat metode alokasi anggaran diantara SKPD. Apakah pembuatan RKA-SKPD telah sesuai dengan prosedur semestinya? Bagaimana daya serapnya, bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya?
6. Apakah rencana belanja dan pendanaan kegiatan / proyek di masing-masing SKPD sudah rasional? Apakah sudah responsif terhadap kebutuhan rakyat di daerah yang bersangkutan?

# JADWAL PENYUSUNAN APBD



# **Permendagri No.21/2011 ttg Pengl. Keu. Daerah**

1. Hak daerah memungut pajak daerah, retribusi daerah, melakukan pinjaman
2. Kewajiban daerah dlm hal keuangan, membayar tagihan pihak ketiga
3. Penerimaan & pengeluaran daerah
4. Kekayaan daerah yg dikelola sendiri atau pihak lain (surat berharga, piutang, barang, kekayaan yg dipisahkan dr BUMD)
5. Kekayaan pihak lain yg dikuasai Pemda dlm penyelenggaraan tugas Pemda & kepentingan umum
6. BOS → masuk ke APBD, bukan lagi dana vertikal
7. PBB & BPHTB adalah pajak daerah
8. Bantuan sosial → supaya utk kegiatan produktif yg meningkatkan kesejahteraan rakyat.

# APBD 2014 Kab Konawe Utara

Uraian		Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
<b>Total Pendapatan</b>		680,648	96.02
	Pendapatan Asli Daerah	25,540	3.60
	Dana Perimbangan	557,817	78.69
	Pajak Daerah	3,796	0.54
	Retribusi Daerah	11,613	1.64
	Lain-lain Pendapatan	4,631	0.65
<b>Total Belanja</b>		708,853	<b>100.00</b>
Belanja Tidak Langsung		182,979	25.81
	Belanja pegawai	177,659	25.06
	Hibah	325	0.05
	Bantuan sosial	-	0.00
	Bantuan keuangan	4,495	0.63
	Belanja tidak terduga	500	0.07
Belanja Langsung		525,874	74.19
	Belanja pegawai	32,246	4.55
	Belanja barang & jasa	214,201	30.22
	Belanja modal	279,427	39.42
Pembiayaan Daerah		28,204	3.98
	SiLPA	28,204	3.98
	Pengeluaran	-	0.00
<b>Defisit</b>		(28,204)	-3.98

# Pola Belanja Kab Konawe Utara

No	URAIAN	Tahun		
		2008 (Rp)	2009 (Rp)	2010 (Rp)
<b>A</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>20.671.372.362</b>	<b>45.041.010.266</b>	<b>96.867.327.900</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	38.645.652.167	65.088.103.473	90.219.162.250
2	Belanja Tambahan Penghasilan	1,449,000,000	3,502,000,000	3.059.000.000
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2,154,176,400	3,857,994,005	3.589.165.650
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah			
<b>B</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>70.846.011.048</b>	<b>251.331.980.667</b>	<b>222.046.288.838</b>
1	Belanja Honorarium PNS	7,251,600,000	19,360,404,848	18.280.810.370
2	Belanja Uang lembur	2,931,000,200	8,705,000,480	4.801.762.000
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	1,768,541,003	3,670,980,000	3.762.009.000
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan	2,897,675,000	6,300,478,300	5.789.000.693
5	Belanja Premi Asuransi Kesehatan			
6	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	5,400,789,000	11,800,790,000	6.971.890.044
7	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1,234,000,000	1,456,900,000	1.250.567.888
8	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	1,765,000,000	2,000,987,650	2.600.780.000
9	Belanja Perjalanan Dinas	13,648,213,297	76,590,153,432	72.257.509.841
10	Belanja Perjalanan Pindah Tugas			
11	Belanja Pemulangan Pegawai			
12	Belanja Modal (Kantor, Modal, Dinas, Mebeulair, Peralatan dan Perlengkapan dll)	33,949,192,548	121,446,285,957	106.331.995.002



# Beberapa Catatan ttg Belanja APBD Kab Konawe Utara

## **Belanja Tidak Langsung:**

- Belanja pegawai proporsinya masih relatif kecil (untuk 4.000 peg, Rp 177,6 M pd th 2014). Efektivitas belanja hendaknya terus ditingkatkan.
- Tidak ada alokasi bantuan sosial. → Mengapa?
- Belanja bantuan keuangan sangat kecil (Rp 4,4 M; 0,63%). → Apakah ADD belum banyak dialokasikan?

## **Belanja Langsung:**

- Belanja honorarium kecil (Rp 18,2 M), tetapi perjalanan dinas begitu besar (Rp 72,2 M atau 22,7% pd th 2010). → Bgm efektivitas dr perjalanan dinas ini?
- Belanja modal proporsinya cukup besar (Rp 279,4 M atau 39,42% pd th 2014). Tetapi rinciannya kembali ke SKPD (kantor, meubelair, alat & perlengkapan). → Apakah sudah jelas kontribusinya bagi rakyat?

# Masalah Kinerja Keuangan Daerah

- Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis, efisien, efektif, akuntabel, dan transparan.
- Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis, antar program dan antar SKPD yg disebabkan oleh:
  - Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan;
  - Perbedaan output kegiatan;
  - Perbedaan lama waktu pelaksanaan;
  - Perbedaan *target group*;
  - Perbedaan kebutuhan sumberdaya;
  - Beragamnya perlakuan objek/rincian objek/item belanja;
- Terjadinya pemborosan anggaran publik.

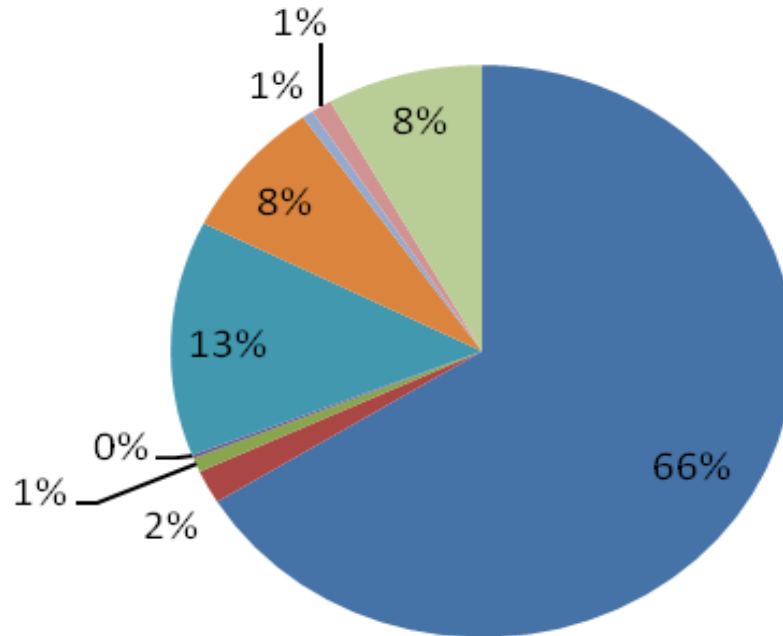
# Apa tantangan Pembangunan Konut?



# APBD 2014 Kab Konawe Utara

Uraian		Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
<b>Total Pendapatan</b>		680,648	96.02
	Pendapatan Asli Daerah	25,540	3.60
	Dana Perimbangan	557,817	78.69
	Pajak Daerah	3,796	0.54
	Retribusi Daerah	11,613	1.64
	Lain-lain Pendapatan	4,631	0.65
<b>Total Belanja</b>		708,853	<b>100.00</b>
Belanja Tidak Langsung		182,979	25.81
	Belanja pegawai	177,659	25.06
	Hibah	325	0.05
	Bantuan sosial	-	0.00
	Bantuan keuangan	4,495	0.63
	Belanja tidak terduga	500	0.07
Belanja Langsung		525,874	74.19
	Belanja pegawai	32,246	4.55
	Belanja barang & jasa	214,201	30.22
	Belanja modal	279,427	39.42
Pembiayaan Daerah		28,204	3.98
	SiLPA	28,204	3.98
	Pengeluaran	-	0.00
<b>Defisit</b>		(28,204)	-3.98

# Penyumbang PDRB Harga Berlaku 2010



■ Pertanian

■ Industri Pengolahan

■ Konstruksi

■ Pengangkutan & Komunikasi

■ Jasa-jasa

■ Pertambangan & penggalian

■ Listrik, gas & air bersih

■ Perdagangan, hotel & restoran

■ Keuangan, sewa & Jasa Perusahaan



Program PPIP di desa Tongalino, Kec. Lembo.  
Masyarakat desa tidak sanggup  
mengelola dana Rp 250 jt utk sumur artesis...

# Program KTM (Kota Terpadu Mandiri) Hialu, Konawe Utara



Dana: 30% dari APBN, 30% dari APBD Kabupaten, 40% dari investor swasta. Apakah gagasan KTM ini dapat berkembang?



Kecamatan Lasolo

Infrastruktur, tantangan pembangunan  
Konawe Utara.



# Masalah umum Administrasi Keuangan Daerah

- Tuntutan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah yang semakin ekonomis. efisien. efektif. akuntabel. dan transparan.
- Adanya ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar kegiatan sejenis. antar program dan antar SKPD. yg disebabkan oleh:
  - Tidak jelasnya definisi suatu kegiatan;
  - Perbedaan output kegiatan;
  - Perbedaan lama waktu pelaksanaan;
  - Perbedaan target group;
  - Perbedaan kebutuhan sumberdaya;
  - Beragamnya perlakuan objek/rincian objek/item belanja;
- Terjadinya pemborosan anggaran;

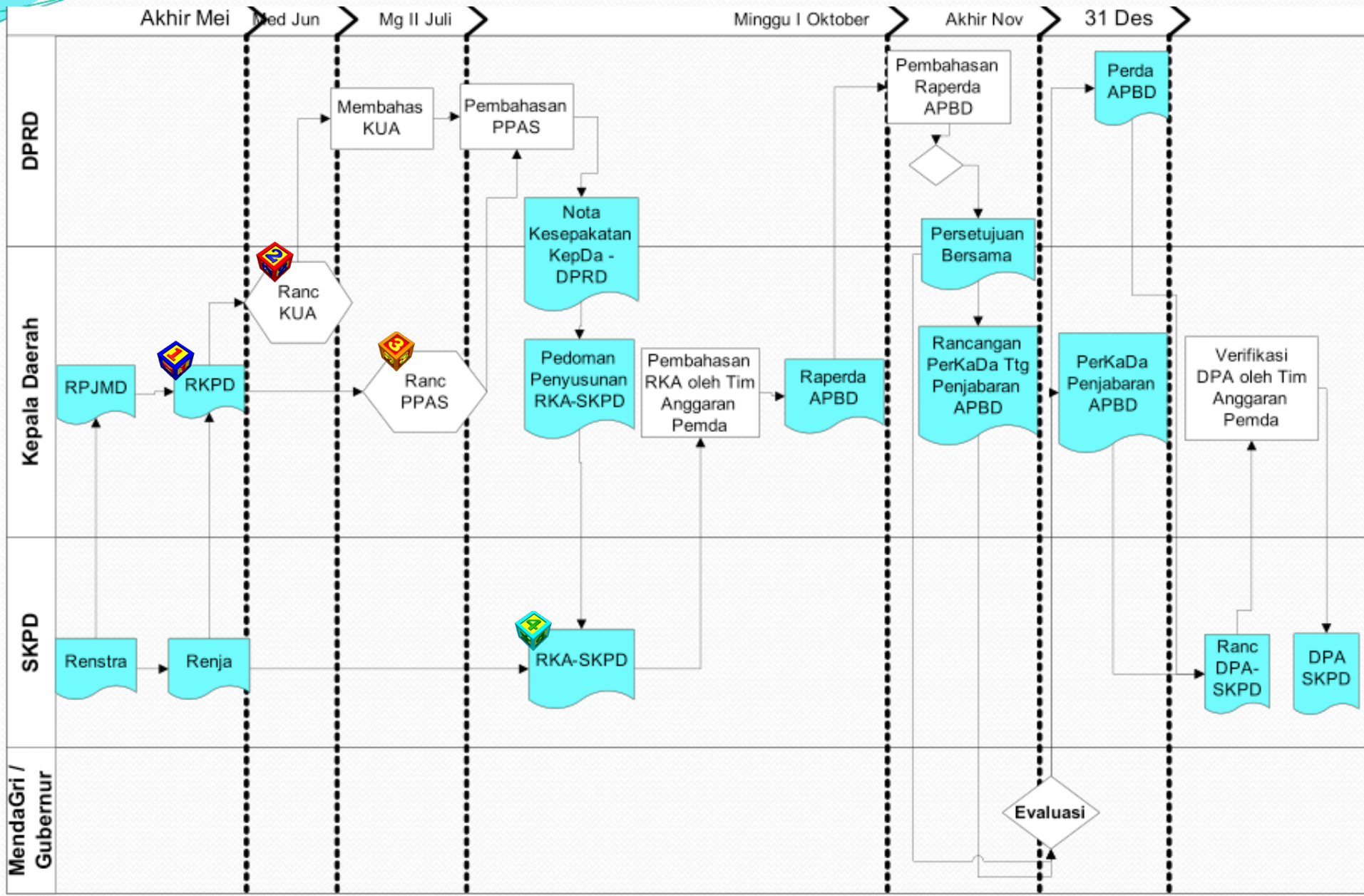
# Prioritas Pendanaan Th 2014

No.	SKPD	Rencana Pendanaan
1	Bappeda & PM	5.864.814.500
2	Kesbangpol Linmas	4.858.000.000
3	Inspektorat Daerah	4.200.000.000
4	Humas & Komunikasi	370.000.000
5	DPRD	11.750.000.000
6	Satpol PP	320.000.000
7	DPKAD	6.132.650.000
8	Bag Hukum	2.110.000.000
9	BKD	18.100.000.000
10	Perpusda	6.753.200.000
11	BPBD	71.600.000.000
12	Dis Kelautan & Perikanan	25.700.000.000
13	Dis PU	16.740.000.000
14	Badan Penyuluhan PPPK	4.000.050.000

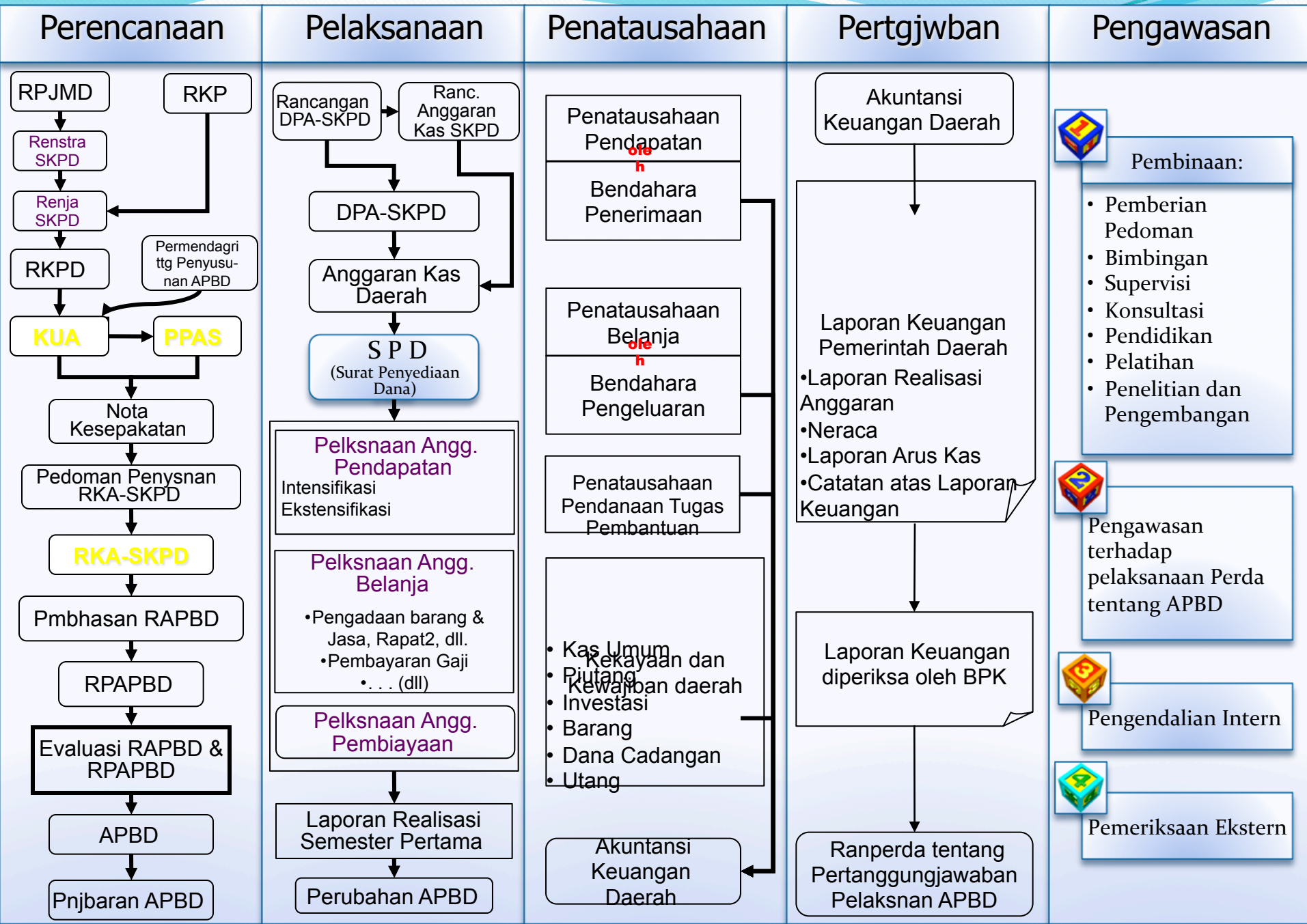
# Prioritas Pendanaan Th 2014

No.	SKPD	Rencana Pendanaan
15	Bag Ekonomi	1.610.000.000
16	Dis Perindag & UMKM	3.480.400.000
17	Dis Pariwisata & Kebudayaan	6.747.500.000
18	Bag Umum & Protokol	3.600.000.000
19	Dis Hubkom & Telematika	32.625.000.000
20	Bag Administrasi Pembangunan	10.850.000.000
21	Dis Kesehatan	73.833.475.000
22	Bag Kesejahteraan Rakyat	4.879.461.000
23	Dis Dukcapil	111.000.000
24	Badan Pemb. Perempuan & KB	1.040.000.000
25	RSUD	7.258.040.000
26	Dis Pendidikan	36.915.000.000
27	Dis Kehutanan	4.865.890.000
28	Badan Pemb. Masy & Pemdes	1.641.700.000
29	Dis Pertambangan & Energi	2.933.140.000
30	Dis Pertanian & Tanaman Pangan	27.275.000.000
31	Bappedalda	1.742.500.000

# JADWAL PENYUSUNAN APBD



# PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



# Modus Korupsi APBD

1. Penggelapan anggaran; mengambil pos anggaran lain dg maksud "menyembunyikan" pos yg mencolok & tidak rasional
2. Menciptakan anggaran baru yg tdk diatur PP 21/2007 ttg Kedudukan Keuangan DPRD
3. Mark-up (penggelembungan) anggaran
  - Alokasi anggaran kembar
  - Anggaran tanpa rincian
  - Menghilangkan pos anggaran
  - Pengambilalihan anggaran yg seharusnya diberikan dlm bentuk jaminan asuransi, diambil sbg uang cash.

Sumber: ICW, 2007

# PENUTUP

Bagaimana supaya anggaran bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan layanan publik?

Banyak pertanyaan yang harus dijawab.

SEKIAN